BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara dilakukan dengan berdasarkan hukum.¹ Hukum yang berlaku di Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang dalam pembukaannya disebutkan bahwa negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam usaha perdamaian dunia.²

Di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) menjadi pengadilan negara tertinggi. MA merupakan pengadilan tingkat kasasi yang berwenang mengeluarkan putusan permohonan peninjauan kembali. Dalam Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada empat badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang memiliki fungsi dan wewenangnya masing-masing. 4 peradilan tersebut diantaranya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945

² Pembukaan UUD RI Tahun 1945

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sekaligus. Salah satu asas dari kekuasaan kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³ Dalam berperkara di Pengadilan Negeri, ketika mengajukan permohonan atau gugatan tergugat harus membayar biaya perkara sesuai ketentuan dari Pengadilan Negeri. Namun tidak semua masyarakat yang akan berperkara merupakan masyarakat yang mampu. Untuk itu, dalam konteks Negara hukum, Negara mengakui serta melindungi hak asasi bagi setiap individu, termasuk juga hak atas bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, pengadilan memiliki kebijakan pembebasan biaya bagi masyarakat kurang mampu yang dinamakan Perkara Prodeo. Kebijakan Pembebasan Biaya Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

³ Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan. Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 disebutkan bahwa negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma – cuma. Namun berdasarkan monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap penerapan layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) di seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum belum berjalan maksimal untuk kemanfaatan masyarakat kurang mampu yang berperkara.⁴

Oleh karena itu dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan pemberian layanan berperkara secara cuma – cuma bagi masyarakat kurang mampu dan bertujuan untuk mengoptimalkan penyampaian informasi mengenai layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada masyarakat luas sehingga mereka dapat mengetahui layanan-layanan apa saja yang bisa dilakukan untuk

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2022

mendapatkan keringanan biaya. Surat edaran ini berisi beberapa kewajiban yang harus dilakukan dalam pengadilan dengan tujuan agar adanya layanan hukum pembebasan biaya ini dapat menyebar luas dan merata kepada masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Dalam laporan tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 tercatat data bahwa perkara yang menggunakan layanan hukum prodeo hanya terdapat 1 kasus saja.⁵ Dan dalam laporan tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 hanya ada 3 kasus yang menggunakan perkara prodeo.⁶ Sedangkan surat edaran ini sudah diterbitkan sejak Bulan Januari pada Tahun 2022 dimana seharusnya pengadilan sudah harus mengoptimalkan penerapan layanan hukum ini untuk masyarakat. Dalam penelitian ini akan mencari apa saja faktor dari sedikitnya jumlah perkara yang menggunakan layanan hukum prodeo dan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung sudah menerapkan isi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tersebut.

Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis berniat melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1 Tahun 2022 ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Penulis akan meneliti apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Negeri

⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

Kabupaten Tulungagung. Dengan tujuan agar penulis mengetahui bagaimana penerapan surat edaran ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi masyarakat kurang mampu serta pembaca sekalian. Diharapkan juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan pelayanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perkara dalam layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung?
2. Apa kendala-kendala Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan layanan hukum prodeo?
3. Bagaimana implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkara dalam layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan layanan hukum prodeo.
3. Untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini hendaknya dapat menambah khazanah keilmuan para pembaca, khususnya terkait implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) di Pengadilan Negeri.
 - b. Penelitian ini hendaknya bisa memberi sumbangsih akademis khususnya dibidang Hukum Tata Negara,.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti lain terutama bagi penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai motivasi untuk menghasilkan karya ilmiah.

- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam melakukan optimalisasi terhadap penerapan layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat kurang mampu.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar lebih mudah dalam mendapatkan bantuan hukum dalam berperkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sehingga dalam penelitian ini melihat bagaimana penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

b. Surat Edaran

Dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ambigu (ganda) akibat dari adanya surat edaran.⁷

c. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi.

d. Pembebasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembebasan berasal dari kata bebas yang memiliki arti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dsb sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dsb dengan leluasa). Sedangkan pembebasan merupakan proses, cara, perbuatan membebaskan.

e. Prodeo

Prodeo merupakan proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis). Pemohon/penggugat berhak mendapatkan semua

⁷ Web Kemenkeu (www.djkn.kemenkeu.go.id) diakses pada tanggal 4 Januari 2024.

jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, sesuai dengan judul penelitian saya yaitu Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Pengadilan Negeri guna mengetahui penerapan surat edaran tersebut dalam layanan berperkara masyarakat di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Karena Prodeo (pembebasan biaya perkara) merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Karena pelaksanaannya yang tidak berjalan dengan semestinya, dikeluarkanlah Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1 Tahun 2022 dengan tujuan untuk mengoptimisasikan layanan hukum prodeo tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kegunaan kebijakan ini kepada masyarakat yang kita ketahui belum banyak yang tahu dengan adanya layanan hukum pembebasan biaya perkara. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat terkait

⁸ Web Pengadilan Agama Tulangbawang Tengah (www.pa-tulangbawangtengah.go.id) diakses pada tanggal 4 Januari 2024

adanya layanan hukum pembebasan biaya perkara di pengadilan. Juga diharapkan untuk pengadilan agar lebih mengoptimalkan pelaksanaan layanan hukum ini di pengadilan dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan hukum ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana serta memudahkan peneliti, maka berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan proposal penelitian, maka peneliti membagi pembahasan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab 1 ini akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai bahan analisis yang tentunya berkaitan dengan judul penelitian yaitu implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Peneliti akan membahas pemaparan teori tersebut serta beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti dapatkan dari tempat penelitian melalui proses wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi langsung di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung terkait dengan kebijakan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan perkara dalam layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung?

2. Apa kendala-kendala Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan layanan hukum prodeo?
3. Bagaimana implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung?

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari penelitian yang penulis teliti.

Pada bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari penelitian yang penulis teliti.